



PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN STRUKTUR LAPANGAN PEKERJAAN DI JAWA TENGAH

Puji Hardati*

Dosen Jurusan Geografi FIS UNNES

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2013
Disetujui Juni 2013
Dipublikasikan Juni 2013

Keywords:

*population growth, employment
structure.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertumbuhan dan struktur lapangan pekerjaan penduduk di Jawa Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama lima dasa warsa terakhir angka pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun angka pertumbuhan mengalami penurunan sampai mencapai kurang dari satu persen setiap tahun, masih terjadi peningkatan angka pengangguran terbuka. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di desa semakin berkurang. Lapangan pekerjaan di sektor pertanian di perdesaan ada kecenderungan semakin tidak menarik angkatan kerja. Selama satu dasa warsa penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian berkurang hampir 7 persen. Sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto menurun menjadi 19,85 persen.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the population growth and employment structure in Central Java. The analysis showed that during the last five decades the population growth rate in Central Java has experienced significant decrease. Although the growth rate has decreased to account for less than one percent each year, it is still an increase in open unemployment. The population residing in the village on the wane. Employment in the agricultural sector in rural areas there is a tendency increasingly unattractive labor force. Decade-long decline in the number of people working in agriculture decreased by almost 7 percent. Contribution of agriculture to the gross regional domestic product decreased to 19.85 percent

© 2013 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
datie58@yahoo.com

PENDAHULUAN

Penduduk dan pembangunan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan. Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan. Penduduk merupakan objek hasil pembangunan dan sekaligus subjek dalam pembangunan. Penduduk sebagai subjek berarti penduduk yang ada menjadi pelaku pembangunan yang akan dilaksanakan. Penduduk sebagai objek berarti penduduk merupakan tujuan dan penikmat hasil pembangunan. Pembangunan seharusnya selalu berwawasan kependudukan.

Mengapa penduduk di suatu wilayah perlu diketahui. Pertama dengan mengetahui jumlahnya, maka setidaknya suatu wilayah akan mengetahui jumlah jiwa yang ada di wilayahnya. Kedua, dapat dipakai untuk memperkirakan jumlah kebutuhan yang diperlukan penduduk baik kebutuhan primer setiap hari maupun kebutuhan sekunder, tersier maupun kuartier. Ketiga, baik dari kuantitas dan kualitas penduduk, dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dengan demikian, data jumlah penduduk merupakan data vital yang harus dimiliki oleh setiap wilayah. Tanpa data jumlah penduduk, maka suatu wilayah akan kesulitan untuk membuat perencanaan pembangunan.

Di setiap daerah tidak sama jumlah penduduknya, karena memiliki keadaan fisik wilayah yang berbeda. Wilayah dengan keadaan fisik yang subur akan menjadi konsentrasi penduduk, sebaliknya apabila tidak subur maka daerah tersebut tidak menjadi pilihan bertempat tinggal (Bintarto, 1977).

Pertumbuhan, dan truktur mata pencaharian penduduk di Jawa Tengah menarik untuk didiskusikan melalui tulisan ini. Selain jumlah penduduknya menempati urutan ke dua secara nasional (BPS, 2010). Lokasinya di tengah-tengah wilayah Pulau Jawa, sehingga menjadi koridor antara dua Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur (Peta RBI). Menggunakan data sekunder hasil Sensus Penduduk dan Survei Penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan analisis secara diskriptif kuantitatif, diharapkan dapat memberikan gambaran pertumbuhan dan struktur lapangan pekerjaan di Jawa Tengah.

DIMENSI PENDUDUK DALAM PEMBANGUNAN

Pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus, yaitu pertama pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan objek dan subjek dalam pembangunan. Pembangunan oleh penduduk dan untuk penduduk. Kedua, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai sumberdaya manusia.

Sutjiptoheriyanto (2008), Qomarudin (2000) memberikan beberapa alasan mengapa penduduk sebagai isu strategis dalam pembangunan. Pertama, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan

program pembangunan yang dilakukan. Kedua, keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Jumlah penduduk yang besar dan diikuti dengan kualitas yang memadai akan menjadi pendorong pembangunan, sebaliknya jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan itu sendiri. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka panjang, maka seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kependudukan dimulai sejak orde baru, tetapi pada orde reformasi sekarang mengalami kemunduran, sehingga dikhawatirkan penduduk akan mengalami ledakan dalam hal jumlah dan akan menjadi beban dalam pembangunan. Sukamdi (2004) memberikan penjelasan bahwa kurangnya perhatian pada lembaga dan institusi yang mengelola penduduk di setiap daerah, dikhawatirkan jumlah penduduk di Indonesia akan meningkat dan akan terjadi *baby boomers* apabila tidak diantisipasi dari sekarang.

Dimensi penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di suatu daerah menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. (Sutjiptoheriyanto, 2008) menjelaskan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan orientasi

pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan ada suatu jaminan akan keberlangsungan proses pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah atau dikenal dengan *bottom up planning*, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

Sesuai dengan kenyataan yang ada di Jawa Tengah bahwa setiap daerah memiliki potensi fisik, sumber daya manusia, maupun kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang secara pesat, dan sebaliknya daerah yang kurang dapat berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Paling tidak, dalam proses perencanaan pembangunan apabila jumlah penduduk menjadi indikator, maka hasil pembangunan itu akan lebih bermakna. Pembangunan sektor pangan misalnya, pemerintah akan dapat menyimpulkan ketercukupan beras itu saja harus mengetahui jumlah penduduk sebagai pengguna atau yang akan menggunakan beras dan produksi gabah. Tanpa jumlah penduduk tidak akan dapat menyimpulkan cukup atau tidak cukup ketersediaan pangan pada suatu waktu. Dengan asumsi setiap penduduk rata-rata memerlukan 0,3 kilogram setiap hari (BPS, 2007), maka di Jawa Tengah harus tersedia beras minimal 9.900 ton setiap hari atau 3.564.000 ton setiap tahun. Ini merupakan salah satu contoh pentingnya data penduduk untuk suatu perencanaan dalam pembangunan. Masih

banyak perencanaan yang memerlukan data kependudukan, sehingga menunjukkan pentingnya data penduduk dalam perencanaan pembangunan.

Jumlah penduduk saja belum dapat dipakai untuk menentukan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya baik dan berhasil. Selain kuantitas, kualitas penduduk dan berbagai indikatornya akan memberikan sumbangan terhadap keberhasilan pembangunan. Dalam kesempatan lain, masih perlu dikaji lebih lanjut tentang kualitas penduduk di Jawa Tengah.

JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jumlah penduduk adalah keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal di suatu daerah baik secara *de facto* maupun *de jure*. Pada waktu tertentu didalamnya mempunyai makna bahwa sekurang-kurangnya selama enam bulan menetap atau berdomisili atau bertempat tinggal dengan maksud sengaja untuk menetap di tempat tersebut. Jadi jumlah penduduk di suatu daerah adalah semua penduduk yang menempati daerah itu. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1992 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa penduduk adalah orang dalam matryanya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Pengertian penduduk pada masa reformasi mengalami pergeseran. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 1, ayat 2, UU RI

No. 23 Tahun 2006).

Jumlah penduduk di suatu daerah secara pasti sulit untuk diketahui, berbagai cara sudah ditempuh. Hal ini banyak terkait dengan kedisiplinan penduduk itu sendiri dalam mencatatkan status kependudukannya di suatu daerah bertempat tinggal. Karena penduduk mempunyai sifat yang sangat dinamis, sehingga tidak mungkin seseorang tinggal diam di rumahnya. Sukamdi (2004) menjelaskan bahwa ada dua sisi yang dapat digunakan untuk memahami kebutuhan pencatatan kejadian demografis. Pertama, dari sisi pemerintah, pencatatan tersebut penting untuk perencanaan dan dasar penentuan kebijakan pelayanan publik. Kedua, dari sisi penduduk, pencatatan tersebut menjadi penting karena hal itu berimplikasi terhadap statusnya sebagai penduduk dan pelayanan yang berhak diperolehnya.

Di Indonesia, ada beberapa pendekatan untuk mengetahui jumlah penduduk (Bogue, 1963, Mantra, 2003). Tiga sumber utama untuk mengetahui jumlah penduduk, yaitu registrasi penduduk, sensus penduduk, dan survai khusus penduduk (Mantra, 2003). Registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk yang bersifat dinamis meliputi lahir, mati, datang, pergi, nikah, talak, rujuk. Pencatatan ini biasa disebut dengan registrasi vital. Dikatakan vital karena mencatat kejadian vital yang dialami penduduk. Registrasi penduduk dilaksanakan oleh penduduk itu sendiri, artinya kejadian vital yang dialami oleh penduduk dilaporkan sendiri oleh penduduk yang melakukan, pihak pemerintah dalam hal ini desa/kelurahan beserta perangkatnya hanya menerima laporan kejadian dan mencatatnya

di sebuah buku register. Apabila penduduk tidak disiplin, tidak mau melaporkan, maka kejadian yang dialaminya tidak akan pernah tercatat. Letak ketidakvalitan data registrasi vital umumnya dapat disebabkan oleh penduduk yang bersangkutan tidak mencatatkan kejadian vitalnya. Kegiatan registrasi penduduk dilaksanakan setiap saat, setiap ada kejadian dan penduduk melaporkannya.

Sumber data penduduk yang kedua adalah Sensus. Sensus penduduk adalah segenap proses mulai dari persiapan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan data penduduk yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah negara. Sensus penduduk sangat berbeda dengan registrasi, sensus dilaksanakan oleh petugas khusus yang diangkat sementara hanya untuk mengumpulkan data penduduk, meliputi seluruh wilayah negara, dan serentak, sehingga ada hari sensus atau *sensus date*. Kejadian yang dicatat di dalam sensus penduduk meliputi semua aspek kependudukan, baik aspek demografis seperti umur, jenis kelamin, dll dan aspek non demografis seperti sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain.

Sumber data ketiga adalah survai khusus, yaitu suatu survai yang sifatnya nasional, dilaksanakan oleh dinas atau institusi, memiliki tujuan khusus, dengan cakupan nasional. Survai khusus sifatnya melengkapi dua sumber data yang sudah dijelaskan sebelum. Survai khusus dilaksanakan oleh seorang ahli dibidangnya, dan hanya data tertentu yang dikumpulkan. Misalnya, Survai Demografi dan Kesehatan (SDKI), Survai Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan lain sebagainya.

Pemerintah, dalam rangka menjamin terwujudnya data kependudukan yang valid, melalui undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan, bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (UU RI, No.23, 2006).

Pertumbuhan penduduk atau *population growth* adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu daerah tertentu (Bogue, 1963; Amien, 1982; Mantra, 2003). Pengertian pertumbuhan penduduk tersebut memiliki dua konsep yang harus diperhatikan yaitu lokasi atau tempat atau *place* dan waktu atau *time*. Lokasi menunjukkan penduduk bertempat tinggal, sedangkan waktu menunjukkan pada dua waktu atau periode waktu. Pada periode yang sama apabila lokasi berbeda maka pertumbuhan penduduknya tidak sama, demikian juga pada daerah yang sama untuk waktu berbeda. Pertumbuhan penduduk dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Perubahan positif terjadi apabila jumlah penduduk suatu wilayah bertambah dari waktu ke waktu. Perubahan bersifat negatif terjadi apabila jumlah penduduk suatu wilayah berkurang dari satu waktu ke waktu.

Beberapa pendekatan untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Pendekatan pertama disebut metode komponen atau *balancing equation*. Dapat

dituliskan dengan rumus seperti berikut.

$$r = (L - M) + (Mi - Mo) : (Pa1 - Pa2 / 2) \times 100 \%$$

(Mantra, 2003)

r : angka pertumbuhan penduduk
L : Jumlah kelahiran
M : Jumlah kematian
Mi : Migrasi masuk
Mo : Migrasi keluar
Pa1 : Penduduk awal
Pa2 : Penduduk akhir

Metode ini digunakan apabila data yang tersedia meliputi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, mobilitas masuk dan mobilitas keluar. Tetapi apabila data komponen penduduk tersebut tidak tersedia, bukan berarti tidak dapat memberikan analisis terhadap pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah dengan metode aritmatik yaitu secara geometrik dan eksponensial. Pendekatan ini digunakan apabila data yang tersedia hanya jumlah penduduk keseluruhan dalam dua periode waktu. Secara umum rumusnya adalah sebagai berikut.

$$Pt = Po (1+r)^t \quad \text{dan} \quad Pt = Po e^{rt} \quad (\text{Mantra, 2003}).$$

Po : Penduduk awal
Pt : Penduduk akhir
r : angka pertumbuhan penduduk
t : periode waktu
1 : konstanta
e : angka eksponensial = 2,71829182

Pertumbuhan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Penduduk akan bertambah jumlahnya apabila ada penduduk yang lahir dan yang datang, dan akan berkurang jumlahnya

apabila ada penduduk yang meninggal dan yang meninggalkan daerah tersebut. Jadi parameter pertumbuhan penduduk di suatu negara adalah lahir atau *birth*, meninggal atau *death*, datang atau *in-migration*, dan pergi atau *out migration*. Pertumbuhan penduduk di planet bumi hanya dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu kelahiran dan kematian saja.

Jumlah penduduk sifatnya dinamis, tidak pernah tidak berubah, tidak pernah tetap, tetapi selalu bertambah atau berkurang. Hal ini sesuai dengan sifat manusia yang dinamis, tidak pernah berhenti. Demikian juga dengan jumlah penduduk manusia itu sendiri. Jumlah penduduk di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami perubahan positif, artinya mengalami pertambahan. Selama sembilan dasa warsa, sejak tahun 1930 pada saat sensus penduduk pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, baru mencapai 13,70 juta jiwa, dan pada tahun 2010 menjadi 32,38 juta jiwa. Selama periode yang sama, pertumbuhan penduduk sangat fluktuatif. Pada periode Tahun 1930-1961, hanya 0,99 persen, periode dasa warsa berikutnya meningkat sangat tajam, yaitu mencapai 1,73 persen. Periode dasa warsa 2000-2010 turun menjadi 0,31 persen (Tabel 1).

Jumlah penduduk di Jawa Tengah yang semakin banyak disebabkan oleh tiga faktor demografis yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan mobilitas atau perpindahan. Menurut data hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), periode tahun terakhir ini ada kecenderungan meningkatnya indikator proses demografis tersebut, salah satunya yaitu Total Fertility Rate meningkat 0,3 persen, (SDKI, 2007).

Walaupun hanya tiga persepuluh persen, jumlah penduduk.
angka absolutnya berpengaruh terhadap

Tabel 1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Jawa Tengah Tahun 1930 - 2010

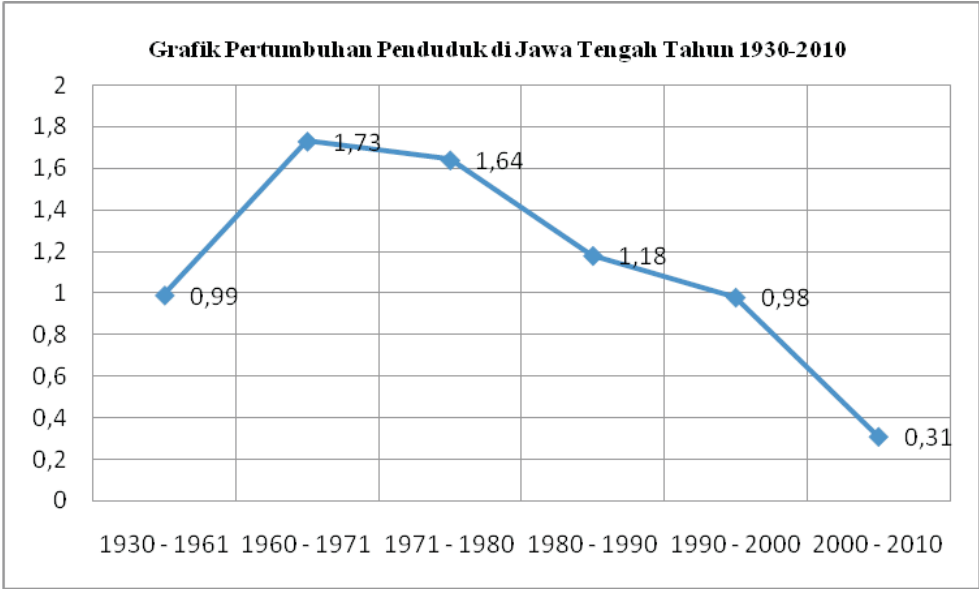
No	Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Pertumbuhan penduduk (%)
1	1930	13,70	-
2	1961	18,40	0,99
3	1971	21,85	1,73
4	2010	32,38	0,31

Sumber : BPS, 1961, 1971, 2010; dan diolah

Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk tahun 2010, diperkirakan jumlah penduduk Jawa Tengah menjadi dua kali lipat atau menjadi 64,77 juta jiwa, kurang lebih akan dicapai 86 tahun lagi atau sekitar tahun 2093. Konsekuensi dari jumlah penduduk yang semakin banyak, di satu sisi menjadi potensi dan sekaligus menjadi beban dalam pembangunan. Sementara luas wilayah tidak pernah bertambah, maka pada waktu yang sama kepadatan penduduk semakin tinggi, diperkirakan pada tahun 2093 akan mencapai 2.052 jiwa setiap kilometer persegi. Konsekuensinya akan terjadi berbagai masalah yang berkaitan

dengan kebutuhan penduduk, apabila jumlah penduduk yang banyak tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitasnya. Misalnya, terbatasnya lapangan pekerjaan, tempat ruang terbuka hijau, dan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi tantangan kita bersama menghadapi masa mendatang dan perlu mendapat solusi bersama sejak sekarang, supaya prediksi tidak terjadi.

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah selanjutnya juga akan berpengaruh terhadap struktur penduduk, baik secara kuantitas, seperti umur, jenis kelamin, usia kerja, angkatan kerja, dan secara kualitas seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya.



Gambar 1: Grafik Pertumbuhan Penduduk di Jawa Tengah Tahun 1930-2010

STRUKTUR LAPANGAN PEKERJAAN

Jumlah penduduk di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap struktur ketenagakerjaan. Beberapa konsep terkait dengan lapangan pekerjaan adalah penduduk usia kerja, angkatan kerja, bekerja dan pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun lebih (BPS, 2012, Rumuris, dkk, 2011; Daliyo, 2009). Selanjutnya tenaga kerja digolongkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain keperluan pribadi. Angkatan kerja dibagi menjadi penduduk yang bekerja, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Di Provinsi Jawa Tengah, konsekuensi dari pertumbuhan penduduk positif, walaupun angkanya semakin menurun (Tabel 1) tetapi jumlah angkatan kerja semakin banyak dan diikuti oleh

meningkatnya partisipasi angkatan kerja (Tabel 2) Selama periode tahun 1998-2012, penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja turun dari 94,93 persen pada tahun 1998 menjadi 94,37 persen dua belas tahun kemudian. Tingkat partisipasi angkatan kerja fluktuatif, pada tahun 1998 ada 71,21 persen, sepuluh tahun kemudian, turun menjadi 68,37 persen, tetapi mengalami kenaikan menjadi 71,43 pada tahun 2012. Rasio kesempatan kerja juga sangat fluktuatif. Pada tahun 1998 mencapai 67,60 persen, pada tahun 2008 turun menjadi 63,35 persen, dan pada tahun 2012 naik menjadi 67,41 persen. Tingkat pengangguran terbuka, naik turun, dari 2,18 persen pada tahun 1998, naik menjadi 7,35 pada tahun 2008, dan turun menjadi 5,63 pada tahun 2012 (Tabel 2). Keadaan ini dapat terkait dengan keadaan krisis global yang berdampak di hampir semua negara dan saerah, sekarang sudah berangsur pulih. Walaupun belum secara menyeluruh, seperti yang terlihat dari besarnya Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Tengah, yang dihitung dari rerata UMK 35 kabupaten/kota, besarnya Rp 601.419,- pada tahun 2008 menjadi Rp 834.255,- pada tahun 2012; masih dibawah besaran Kebutuhan Hidup Minimum (KHL) pada tahun yang sama yaitu Rp 864.859,- (Disnakertransduk, 2012).

Tabel 2. Kesempatan Kerja, Partisipasi Angkatan Kerja, dan Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 1998 - 2012

No	Indikator	1998	2008	2012
1	Bekerja terhadap angkatan kerja (persen)	94,93	92,65	94,37
2	Rasio kesempatan kerja (persen)	67,60	63,35	67,41
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	71,21	68,37	71,43
4	Tingkat pengangguran terbuka (persen)	2,18	7,35	5,63
5	Indek gini	-	-	0,3033*

Sumber: BPS, 1998, BPS, 2008, BPS, 2012; dan diolah.
*Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2013.

Penduduk yang bekerja dikelompokkan menjadi 5 srtuktur lapangan pekerjaan, yaitu pertama, pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; kedua, industri pengiolahan; ketiga, perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; keempat, jasa kemasyarakatan; dan kelima, lainnya meliputi pertambangan, penggalian, listrik, gas, air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi (Tabel 3) (BPS, 2012). Di Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk yang bekerja di setiap sektor lapangan pekerjaan mengalami berubah perubahan. Selama satu dasa warsa, di desa Jawa Tengah, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun 7,92 persen, yaitu dari 68,30 persen pada tahun 1998 menjadi 60,38 persen pada tahun 2008. Sebaliknya, penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian (industri pertambangan, dan jasa) naik 31,70 persen menjadi 38,62 persen (BPS, 2008). Fenomena ini selain disebabkan oleh berkurangnya penduduk di sektor pertanian karena sektor pertanian sudah tidak mampu memberikan harapan pemenuhan hidup yang layak,juga

disebabkan oleh adanya konversi desa pertanian ke desa non-petanian. Di Jawa Tengah terdapat 52,3 persen desa mengalami konversi.

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bagian dari partisipasi pembangunan. Penyerapan tenaga kerja menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu sektor produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja. Berdasarkan 5 struktur lapangan pekerjaan, di daerah perdesaan, sektor pertanian mampu menyerap 45,50 persen, tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB hanya 19,85 persen. Sektor non-pertanian menyerap 54,50 persen angkatan kerja yang bekerja, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 80,15 persen (Tabel 3).

Sektor pertanian dan sektor non pertanian secara bersama-sama dapat bekerjasama atau bersinergi dalam berbagai kegiatan pembangunan, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di berbagi stuktur pekerjaan yang ditekuninya.

Tabel 3. Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan, Desa Kota dan Kontribusi Sektor pada PDRB di Jawa Tengah Tahun 2012

Lapangan Pekerjaan *	Desa	Kota	Kontribusi PDRB
1	45,50	13,30	19,85
2	16,44	25,57	34,05
3	15,65	28,70	19,51
4	10,57	17,12	9,66
5	11,84	15,31	16,93
Jawa Tengah 2012	54,26	45,74	100,00
Jawa Tengah 2008	60,38	39,62	100,00
Jawa Tengah Tahun 1998	68,30	31,70	100,00

Sumber: BPS, Jawa Tengah, 2012; dan diolah

*) 1. Pertanian pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; 4. Jasa kemasyarakatan; dan
 2. Industri pengiolahan; 5. Lainnya: pertambangan, penggalian, listrik, gas, air,
 3. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi.

PENUTUP

Jumlah penduduk di Jawa Tengah secara absolut mengalami pertumbuhan positif, artinya semakin banyak jumlahnya, walaupun pertumbuhannya semakin menurun. Selama sembilan dasa warsa, mengalami fluktuasi, tetapi belum diikuti oleh penurunan angka pengangguran. Konsekuensinya jumlah angkatan kerja semakin bertambah. Terjadi perubahan jumlah angkatan kerja yang bertempat tinggal di desa. Ada kecenderungan angkatan kerja di sektor pertanian bergeser ke sektor industri dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1992. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera..* Jakarta. BKKBN.
- Anonim. 2006. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.* Jakarta. Kemendagri RI.
- BPS. 1961. *Sensus Penduduk.* Jakarta. BPS.
- BPS. 1971. *Sensus Penduduk.* Jakarta. BPS.
- BPS. 1980. *Sensus Penduduk.* Jakarta. BPS
- BPS. 1990.. *Sensus Penduduk.* Jakarta. BPS.
- BPS. 1998. *Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah.* Semarang. BPS.
- BPS. 2000. *Sensus Penduduk Jawa Tengah.* Semarang. BPS
- BPS. 2007. *Jawa Tengah Dalam Angka 2007.* Semarang. BPS.
- BPS. 2008. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah.* Semarang. BPS.
- BPS. 2010. *Sensus Penduduk.* Semarang. BPS.
- BPS. 2012. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah.* Semarang. BPS.
- Bintarto. 1977. *Suatu Penuntun: Geografi Desa.* Yogyakarta. U.P. Spring.
- Bogue. D. J. 1963. *Principles of Demography.* John Willey and Sons Inc. New York..
- Daliyo. 2009. Pola Pendayagunaan Angkatan Kerja di Daerah Perdesaan. *Jurnal Kependudukan Indonesia.* Vol. IV No.2, 2009. Halaman 35-59.
- Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan. 2012. *Laporan Tahunan.* Semarang. Dinakertransduk.
- Faturochman dan Dwiyanto, Agus. 2001. *Reorientasi Kebijakan Kependudukan.* Yogyakarta. PPK UGM.
- Mantra. Ida Bagus. 2003. *Demografi Umum.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Malthus, Et Al. 1960. *Three Essays on Populastion.* New York. The New American Library of World Literature. Terjemahan. Dinding Sulahudin. 2007 *Kependudukan Dilema dan Solusi.*
- Rukminto Adi, Isbandi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembagn Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Rumuris Purba, Elsa; Indrayanti, Ratna; Borenda Sari, Niki. 2013. *Analisa*

Pasar Tenaga Kerja di Jawa. *Warta Demografi*. Tahun ke 41 No. 1, 2011.

Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sukamdi. 2004. Memahami Masalah Kependudukan di Indonesia Pasca Orde Baru. *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta. PSKK UGM.

Sutjiptoheriyanto. 2008. Isu-isu Terkini Masalah Kependudukan. *Warta Demografi*. Tahun Ke-38, No.2. Tahun 2008.

Rusli, Said. 1982. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta. LP3ES.